

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Penelitian

Kecurangan telah berkembang di berbagai negara termasuk di Indonesia, umumnya kecurangan berkaitan dengan korupsi. Dalam korupsi, tindakan yang lazim dilakukan di antaranya adalah memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan *mark-up* yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Tindakan ini merupakan bentuk kecurangan. Kecurangan merupakan bentuk penipuan yang sengaja dilakukan sehingga dapat menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan (Rahmawati dalam Zainal 2013:2).

Kecurangan akuntansi telah berkembang di berbagai negara di seluruh dunia. Indonesia termasuk negara dengan peringkat korupsi tertinggi di dunia. Dari data *Corruption Perception Index (CPI)* tahun 2005 sampai dengan 2009, skor rata-rata CPI Indonesia hanya 2,4 dari angka ideal 10, suatu “prestasi” yang membuat anak bangsa ini malu karena dikenal sebagai salah satu Negara terkorup. Apabila dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura yang memiliki skor rata-rata CPI masing-masing 4,8 dan 9,2 Indonesia masih sangat jauh dibawahnya. (Sumber : <http://www.transparency.org>).

Kecurangan akuntansi telah menarik banyak perhatian media dan menjadi isu yang menonjol serta penting di mata pemain bisnis dunia. Kecurangan merupakan bentuk penipuan yang sengaja dilakukan sehingga dapat menimbulkan

kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan (Alison, 2006 dalam Rahmawati, 2012). Ikatan Akuntansi Indonesia seperti yang dikutip oleh Wilopo (2006) menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai salah saji yang menimbulkan kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau menghilangkan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan dan salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Dampak dan konsekuensi yang ditimbulkan oleh kecurangan akuntansi tidak dapat dihindarkan. Perusahaan akan menderita kerugian yang signifikan karena hal tersebut. Kecurangan akuntansi biasanya dipicu oleh perusahaan yang ingin laporan keuangannya terlihat baik. Selain itu, perusahaan juga ingin mengurangi persepsi di mata para calon investor bahwa perusahaannya berisiko. Saham perusahaan mungkin akan dinilai lebih tinggi jika investor menilai bahwa perusahaan tersebut memiliki tingkat risiko yang rendah, karena mereka tidak akan khawatir perusahaan akan bangkrut.

Di Indonesia, kecurangan akuntansi dibuktikan dengan adanya kasus-kasus yang melibatkan banyak organisasi dan perusahaan tak terkecuali Badan perusahaan milik negara atau BUMN. Sebagai entitas bisnis, peran BUMN dirasakan cukup dominan, jumlahnya yang mencapai ratusan perusahaan dan asetnya yang secara total mencapai ratusan triliun rupiah dengan lingkup usaha

yang rata-rata dapat digolongkan strategis. Oleh karena hal itu tidak heran BUMN menjadi sorotan masyarakat. Di Indonesia, perusahaan swasta maupun BUMN, belum sepenuhnya memenuhi atau menganut prinsip *good corporate governance*. Masih terdapat banyak kesalahan yang ada pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, terutama dalam prinsip akuntabilitas yang sangat rendah karena tidak adanya transparansi. Kemandekan dalam pelaksanaan audit terhadap aset negara tidak dikelola dengan transparan, tidak terdapat penyajian data yang rinci ke publik, sehingga sering menyebabkan mark up maupun kebocoran dana pada tingkat birokrat. Sejak tahun 2005 hingga 2011, BPK telah merekomendasikan penyelesaian kerugian negara terhadap BUMN (termasuk anak perusahaan) sebesar Rp20.397.233.650.000,00. Laporan KPK tahun 2011 juga menyebutkan bahwa sejak tahun 2004 sampai dengan 2011 terdapat pengaduan terhadap BUMN/BUMD sebanyak 36,001 kasus. Praktik kecurangan di BUMN ini pada akhirnya menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan mengurangi efisiensi BUMN. (www.bpk.go.id)

Salah satu kasus *fraud asset misappropriation* yang menimpa BUMN di Indonesia adalah kasus yang menimpa PT Barata Indonesia (Persero). Kasus ini dilakukan oleh Mahyudin Harahap (Direktur Pemberdayaan Keuangan dan SDM PT Barata Indonesia) yang diduga menjual aset negara berupa tanah bersama dengan Ir Harsusanto (Dirut PT Barata Indonesia) dan Shindo Sumidomo. Penjualan aset ini terjadi pada tahun 2003-2005 lalu. Penjualan tersebut dinilai bertentangan dengan, di antaranya, UU RI No 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Kepmen Keuangan Nomor 89/KMK.013/1991 tentang Pemindehan

Aktiva Tetap BUMN. KPK memaparkan, tindak pidana korupsi kasus ini dilakukan dengan dengan cara menurunkan Nilai Jual Objek Pajak tanah milik PT Barata yang berlaku tahun 2004. Tanah yang dijual berlokasi di Surabaya, Jawa Timur. Diungkapkan, harga tanah yang seharusnya mencapai Rp 132 miliar kemudian dijual kepada swasta dengan harga hanya sekitar Rp 82 miliar. Perbuatan ini dinilai memperkaya pihak tim taksasi penjualan aset sebesar Rp 894 juta lebih dan Shindo Sumidomo dari PT Cahaya Surya Unggul Tama sebesar Rp 21,770 miliar. Negara pun dirugikan hingga Rp 22,690 miliar lebih. (www.merdeka.com).

Fraud asset misappropriation juga terjadi pada PT Kereta Api Indonesia yang dilakukan oleh humas perusahaan tersebut, yaitu (1) adanya penjualan aset perusahaan berupa gerbong kuno dimana hasil penjualan masuk ke kantong pribadi; (2) Pengalihfungsian aset milik perusahaan berupa tanah menjadi milik pribadi, selain itu di Lampung tanah milik perusahaan beralih menjadi pusat perbelanjaan (Sry Ayu, 2012).

Kasus lain yang terjadi adalah pada PT Bank Negara Indonesia (BNI) 1946, yang baru terungkap tahun 2013 ini, yaitu terjadinya pembobolan pada bank tersebut. Kejadian ini bermula pada tahun 2001, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali menempatkan dana sebesar Rp 195 milyar di BNI cabang Radio Dalam, Jakarta Selatan. Agus Salim selaku Kepala Cabang BNI Radio lantas memindahbukukan dana tersebut ke rekening Faisal A sebesar Rp 50 milyar dan ke rekening Dedy Suryawan sebesar Rp 145 milyar. Akibat perbuatan ketiganya,

negara dalam hal ini PT BNI Cabang Radio Dalam, telah dirugikan sebesar Rp 50 miliar. (www.detik.com).

Audit internal adalah salah satu perangkat yang diyakini dapat mendeteksi dan mencegah *fraud* dalam suatu organisasi atau perusahaan, karena tanggung jawab auditor internal adalah untuk membantu manajemen mencegah, mendeteksi, menginvestigasi dan melaporkan *fraud*.(SIAS no 3:1993).Audit internal juga merupakan bagian penting dari struktur tata kelola organisasi perusahaan. Pentingnya ini disorot oleh *Institute of Internal Auditor (IIA) Practice Advisory*2130–1 pada peran auditor internal dalam budaya etis suatu organisasi, yang menekankan bahwa auditor internal harus mengambil peran aktif dalam mendukung budaya etis organisasi dan dengan cara ini dapat membantu mendeteksi penyalahgunaan aset organisasi (IIA, 2004).

Auditor internal dituntut untuk waspada terhadap setiap hal yang menunjukkan adanya kemungkinan *fraud*, yang mencakup identifikasi titik-titik kritis terhadap kemungkinan terjadinya *fraud* dan penilaian terhadap system pengendalian yang ada, dimulai sejak lingkungan pengendalian hingga pemantauan terhadap penerapan sistem pengendalian.Seandainya terjadi *fraud*, auditor internal bertanggung jawab untuk membantu manajemen mencegah *fraud* dengan melakukan pengujian dan evaluasi keandalan dan efektifitas dari pengendalian, seiring dengan potensi risiko terjadinya kecurangan atau *fraud* dalam berbagai segmen (Modul *Fraud Auditing* yang dikeluarkan oleh Pusdiklatwas BPKP tahun 2008).

Status organisasi audit internal di BUMN ditempatkan langsung di bawah direktur utama, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat *conflict of interest* yang memungkinkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu untuk mengintervensi objektivitas auditor internal. Terkait dengan struktur organisasi badan usaha di Indonesia yang menganut dual board keberanian auditor internal untuk mengungkapkannya sangat terbatas (Hiro: 2004). Oleh karena itu profesionalisme auditor internal pada fungsi audit internal Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sangat diperlukan dalam mendeteksi terjadinya fraud.

Penulis dalam melakukan penelitian mengambil rujukan dari beberapa penelitian terdahulu, diantaranya yang dilakukan oleh Nurharyanto (2008), yang menunjukkan auditor internal yang melakukan tugas audit dengan baik memberikan pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap pendeteksian kecurangan. Nurharyanto meneliti tentang standar-standar kualitas seorang auditor internal sedangkan rencana penelitian ini adalah pengaruh auditor internal terhadap pendeteksian kecurangan dengan lokus penelitian pada salah satu Badan Usaha Milik Negara.

Selain itu terdapat rujukan penelitian lain yaitu yang dilakukan oleh Wilopo pada tahun 2006 dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang berpengaruh terhadap Kecendrungan Kecurangan Akuntansi: Studi Pada Perusahaan Terbuka dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia”, faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian Wilopo adalah variable bebas keefektifan pengendalian intern, kesesuaian kompensasi, ketaatan pada aturan akuntansi, asimetris informasi, moralitas manajemen, serta variabel terikat perilaku tidak etis dan kecendrungan

kecurangan akuntansi. Dimana pada penelitian Wilopo yang dijadikan sampel adalah Perusahaan terbuka dan BUMN diseluruh Indonesia dengan metode pengambilan sampel adalah *Stratified Random Sampling*, yaitu mengelompokan perusahaan berdasarkan sembilan sektor usaha. Sehingga peneliti melihat adanya kelemahan yaitu ada kemungkinan tidak terambilnya sampel secara merata yang mewakili setiap daerah di Indonesia

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini mengambil judul :**“Pengaruh Audit Internal Terhadap Pendeteksian Kecurangan Pada PT.Dirgantara Indonesia (Persero) Bandung**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana audit internal pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Bandung
2. Bagaimana pendeteksian kecurangan pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Bandung
3. Bagaimana pengaruh audit internal terhadap pendeteksian kecurangan pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Bandung

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pengaruh penerapan audit internal terhadap pendeteksian kecurangan dan

meningkatkan pengetahuan penulis khususnya mengenai audit internal tidak kecurangan sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Pasundan Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Audit internal pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Bandung
2. Pendeteksian kecurangan pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Bandung
3. Pengaruh audit internal terhadap pendeteksian kecurangan pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Bandung

1.4 Kegunaan Penelitian

Beberapa pihak yang diharapkan dapat mengambil manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai Pengaruh penerapan audit internal terhadap pendeteksian kecurangan. Selain itu, penulis juga dapat mengetahui sebenarnya penerapan teori yang didapat dari perkuliahan dengan praktek yang ada di lapangan.

b. Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan, sebagai informasi dan bahan evaluasi atas penerapan audit internal dan pendeteksian kecurangan yang telah dilakukan

c. Bagi Pihak Lain

Diharapkan dapat menjadi sumber pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai sarana informasi bagi para pembaca yang akan mengadakan penelitian mengenai bidang yang sama.

1.4.2 Kegunaan Teoretis

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat menambah referensi di bidang akuntansi khususnya auditing di masa yang akan datang. Selain itu, diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan judul tersebut.